

Peningkatan Kualitas Administrasi melalui Sosialisasi Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024

Rizal Afif Kurniawan. - CILACAP.JURNALIS.ID

Sep 3, 2024 - 13:47



Acara diawali dengan pembacaan doa yang khuyuik, mencerminkan semangat dan harapan besar dalam pelaksanaan pelatihan dasar ini. Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan pembacaan laporan kegiatan oleh Morina Harahap, S.H., M.M., selaku Kepala Pusat Pengembangan dan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan. Dalam laporannya, Morina menjelaskan bahwa pelatihan dasar ini mencakup dua kurikulum penting, yaitu Kurikulum Pembentukan Karakter PNS dan Kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas. "Pelatihan ini menggunakan metode Blended Learning yang dibagi dalam empat tahapan," ungkapnya, merinci bahwa pembelajaran akan melibatkan pembelajaran mandiri, daring Synchronous dan Asynchronous, serta praktik aktualisasi di unit kerja masing-masing. Seluruh kegiatan akan berlangsung selama 74 hari kerja, mencakup agenda penting seperti orientasi program, bela negara, nilai-nilai dasar PNS, hingga evaluasi aktualisasi.

Setelah laporan kegiatan, acara dilanjutkan dengan penyematan tanda peserta kepada perwakilan CPNS sebagai simbol dimulainya pelatihan. Ir. Razilu, M.Si., CGCAE, selaku Kepala BPSDM Hukum dan HAM, dalam sambutannya menegaskan pentingnya Pelatihan Dasar CPNS ini sebagai fondasi utama dalam karier sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Pelatihan ini hanya bisa diikuti sekali, dan merupakan syarat utama untuk diangkat menjadi PNS. Saya



3 SEPTEMBER 2024

**UPACARA PEMBUKAAN PELATIHAN DASAR CPNS GELOMBANG II
ANGKATAN VII-XVII DAN PELUNCURAN PEMBELAJARAN
MANDIRI UNTUK GELOMBANG III DI BPSDM DAN BADIKLAT
HUKUM DAN HAM TAHUN ANGGARAN 2024**



**JANGAN KETINGGALAN
INFO MENARIK LAINNYA !**

BerAKHLAK



**SEMAKIN REFORMASI
PASTI HUKUM**

**PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA**



CILACAP, INFO_PAS - Lapas Karanganyar turut serta dalam kegiatan Zoom Sosialisasi Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang diselenggarakan oleh Biro Umum Sekretariat Jenderal, Senin (02/09/24).

Kegiatan ini diikuti oleh Kaur Kepegawaian dan Keuangan Lapas Karanganyar. Sosialisasi tersebut diselenggarakan secara hybrid, dengan penyampaian langsung dari Ruang Rapat Lantai 5, Ruang 553 Gedung Sekretariat Jenderal, dan secara virtual melalui platform Zoom Meeting. Kegiatan ini merupakan bagian penting dalam peningkatan pemahaman mengenai Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Acara dimulai dengan pembukaan yang diikuti oleh sosialisasi mengenai Tata Naskah Dinas yang disampaikan oleh Bapak Dedi Syahputra, Arsiparis Ahli Muda pada Biro Umum. Beliau memaparkan berbagai hal terkait Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2024 yang mengatur Tata Naskah Dinas di Kementerian Hukum dan HAM. Materi yang disampaikan meliputi aturan-aturan yang harus dipatuhi dalam penyusunan dokumen resmi, format dan struktur naskah dinas, serta pentingnya ketaatan pada pedoman yang telah ditetapkan demi memastikan kelancaran administrasi dan dokumentasi di

lingkungan kerja.

Selama penyampaian materi, peserta sosialisasi terlihat antusias dalam menyimak setiap poin yang dijelaskan. Bapak Dedi Syahputra menekankan bahwa penyusunan Tata Naskah Dinas harus mematuhi peraturan yang ada untuk menjaga akurasi, keamanan, serta kejelasan dalam setiap surat atau dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah.

Setelah pemaparan materi selesai, sesi diskusi dibuka untuk memberikan kesempatan kepada peserta mengajukan pertanyaan seputar penerapan Tata Naskah Dinas di masing-masing unit. Banyak pertanyaan yang diajukan terkait teknis pelaksanaan dan penerapan aturan tersebut, serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasinya. Kaur Kepegawaian dan Keuangan Lapas Karanganyar turut serta dalam diskusi, dengan mengajukan pertanyaan terkait pengelolaan dokumen dinas dan penerapan format yang sesuai dalam naskah dinas internal. Jawaban yang diberikan oleh narasumber diharapkan dapat membantu peserta untuk lebih memahami dan menerapkan tata naskah yang baik dan benar sesuai dengan peraturan terbaru.